



**BANK
MUAMALAT HARKAT**
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



2023

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma
Nomor Telepon : 0736-7311407
Penjelasan Umum :

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola adalah dokumen yang wajib disusun oleh BPRS Muamalat Harkat untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas penerapan tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasional, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam memastikan bahwa BPRS Muamalat Harkat dikelola berdasarkan prinsip - prinsip tata kelola dan sesuai prinsip syariah. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait baik intern maupun ekstern.

BPRS Muamalat Harkat mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dalam penerapan tata Kelola di setiap jenjang bagian pada BPRS Muamalat Harkat, secara singkat kami uraikan prinsip - prinsip dalam penerapan tata Kelola sebagai berikut :

- 1.Keterbukaan (transparency) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan
- 2.Akuntabilitas (accountability) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban
- 3.Tanggung jawab (responsibility) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
- 4.Independensi (independency) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
- 5.Kewajaran (fairness) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik

Penerapan tata Kelola bagi BPRS paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

- 1.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 4.Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
- 5.Penanganan benturan kepentingan
- 6.Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
- 7.Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern.
- 8.Batas maksimum penyaluran dana
- 9.Rencana bisnis BPRS

Laporan yang kami sajikan Adalah laporan transparansi penerapan tata Kelola (GCG) tahun 2025 PT BPRS Muamalat Harkat dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assesment) pelaksanaan tata kelola PT BPRS Muamalat Harkat Posisi 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Posisi Laporan 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Direktur Utama	- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, - Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
2	Deri Haspriyanti, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	- Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, - Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, - Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib berkoordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, - Wajib mencegah direksi bank utk tdk menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan, - Mamantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen bank kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, - wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada dirut dengan tembusan kepada dekom.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris : Manajemen sudah merevisi SOP hapus buku dengan No 18/BMH/SOP/XII/2023, dan terus meningkatkan penagihan kepada nasabah hapus buku melalui Remedial dan AO.

Keterangan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan DPS : SOP produk pembiayaan AL-QORDH akan dipenuhi paling lama 30 April 2024, berdasarkan fatwa DSN-MUI no. 128/DSN-MUI/VII/2019 untuk perpindahan asuransi syariah ke asuransi konvensional blm bisa dilakukan.f

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Komisaris Utama	- Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , - Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi , - Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, - Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, - Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom.
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Komisaris	- Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , - Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi , - Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, - Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, - Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom.

Rekomendasi kepada Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Rekomendasi Kepada Direksi : 1. Agar meninjau ulang pelaksanaan kebijakan hapus buku 2. Agar meningkatkan penagihan pada nasabah yang sudah dihapus buku

Keterangan

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat dekom

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat
Posisi Laporan 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Anggota DPS	- Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI, -Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, - Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya, - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS, - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi : 1. Agar membuat SOP PRODUK pembiayaan AL-QORDH pada BMH dan UPZ BMH, 2. Agar melengkapi SOP IMBT dan memasukkan Skema sale and lease back pada tata cara pemberian pembiayaan IMBT 3. Memberikan OPINI/SARAN BPRS muamalat Harkat boleh atau tidak berpidahan mitra asuransi berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI no. 128/DSN-MUI/VII/2019 tentang Penyelenggaraan usaha pialang asuransi dan usaha pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah, 4. Memberikan saran agar pengelolaan UPZ bisa dimaksimalkan lagi kedepannya dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada serta melengkapi LAPORAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF UPZ BMH sesuai dengan ketentuan perbazznas no 02 tahun 2016, terkait RINCIAN DATA PENERIMA/MUSTAHIK dari berbagai macam asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat sehingga hak semua asnaf dapat terpenuhi dan menghindari pemberian dana zakat yang berulang kepada asnaf-asnaf tertentu saja.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
151/01/BMH/VIII/2023	14-08-2023	32/01/BMH/I/2024	30-01-2024

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat
Posisi Laporan 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan				

Keterangan

BPRS belum memiliki program kerja komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Posisi Laporan 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	53,000,000	0.76	-	0.00

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy
2	Deri Haspriyanti, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Direktur utama mempunyai hubungan keuangan sebagai salah satu pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Nama Lembaga Jasa : PT Bank Perekonomian

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Nihil
2	Deri Haspriyanti, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

keluarga direksi BPRS Muamalat Harkat tidak ada yang menjadi anggota direksi lain, anggota dewan komisaris atau pemegang saham pada BPRS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat
Posisi Laporan 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	103,000,000	1.47	-	0.00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	225,000,000	3.21	-	0.00

Keterangan

Anggota dewan komisaris PT BPRS muamalat Harkat merupakan para pemegang saham

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada
BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa : PT Bank Perekonomian
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Yefriza, SE. MPPM.Ph.D - Pemegang Saham
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	Andi Novianza Wirajati, ST - Pemegang Saham

Keterangan

Anggota dekom sebagai pemegang saham pada BPRS, dan tidak sebagai anggota direksi atau dekom pada perusahaan lainnya.

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Drs.H.A. Razie Jachya - Ayah Kandung, Hj.
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	H. Iskandar Ramis, SIP.M.Si - Bapak Kandung

Keterangan

Keluarga anggota dewan komisaris hanya memiliki hubungan sebagai pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat
Posisi Laporan 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga /Perusahaan	Jabatan
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil

Keterangan

Dewan komisaris tidak ada yang merangkap jabatan pada BPRS/Lembaga/Perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara	Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Muamalat Harkat juga merangkap jabatan sebagai DPS BPRS MDSN (Maslahat Dana Syariah Nusantara) Kota Bengkulu

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Rutin

Nama Lembaga Jasa

PT Bank Perekonomian Rakyat

Posisi Laporan

31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	504,000,000.00	2	160,800,000.00	1	34,560,000.00
2.	Tunjangan	2	111,724,672.00	2	15,050,000.00	1	2,880,000.00
3.	Tantiem	2	0.00	2	0.00	1	0.00
4.	Bonus	2	0.00	2	0.00	1	0.00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	1	12,879,000.00	2	59,433,750.00	1	0.00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	404,694,924.00	2	13,400,000.00	1	2,880,000.00
	Total Remunerasi		1,033,298,596.00		248,683,750.00		40,320,000.00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0.00	2	0.00	1	0.00
2.	Transportasi	2	32,253,500.00	2	0.00	1	0.00
3.	Kesehatan	2	14,400,000.00	2	0.00	1	0.00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0.00	2	0.00	1	356,000.00
	Total Fasilitas Lain		46,653,500.00		0.00		356,000.00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1,079,952,096.00		248,683,750.00		40,676,000.00

Keterangan

Paket atau kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1.33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	2.19
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1.00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2.81
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.38
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	3.21

Keterangan

Gaji karyawan ditetapkan pada SK direksi, sedangkan kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS. Perhitungan rasio perbandingan gaji dapat dilihat pada tabel diatas, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap pada PT BPRS Muamalat Harkat.

Rutin

Nama Lembaga Jasa : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	20-03-2023	2	Evaluasi kinerja bank berdasarkan laporan keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2	30-05-2023	2	Evaluasi kinerja bank berdasarkan laporan keuangan mulai dari bulan Januari 2023 s/d April 2023
3	25-09-2023	2	Evaluasi kinerja bank berdasarkan laporan keuangan month to month antara bulan Juli s/d Agustus 2023 dan year to year antara bulan Agustus 2022 dan Agustus 2023

Keterangan

Rapat dilakukan oleh kedua dewan komisaris yaitu Yefriza dan Andi Novianza Wirajati.

Rutin

Nama Lembaga Jasa

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan

31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	3	0	100.00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	3	0	100.00

Keterangan

Rapat dihadiri secara fisik oleh kedua dekom

Nama Lembaga Jasa : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	19-01-2023	4	Pembahasan Belum adanya SOP Pembiayaan Al-qardh pada Produk Perbankan maupun pada produk UPZ BMH
2	01-02-2023	5	1.Membahas laporan PE KEPATUHAN terkait DPS pada TATA KELOLA OJK 2. Meninjau kembali progress laporan semester II DPS BMH tahun 2022
3	25-04-2023	4	Penambahan pasal dalam SOP IMBT terkait praktik IMBT perbankan yang diawali dengan Skema Sale and lease Back/membeli kemudian menyewakan kembali
4	30-05-2023	5	Permasalahan mitra asuransi syariah yang sudah dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan tidak lagi memiliki kapasitas yang cukup untuk menutupi risiko serta memberikan persyaratan calon nasabah dengan kriteria tertentu yang memberatkan pihak perbankan, sehingga pihak perbankan mengajukan perpindahan mitra asuransi.
5	20-06-2023	5	Sosialisasi LAPORAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF UPZ BMH sesuai dengan ketentuan perbazznas no 02 tahun 2016, terkait RINCIAN DATA PENERIMA/MUSTAHIK dari berbagai macam asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat sehingga hak semua asnaf dapat terpenuhi dan menghindari pemberian dana zakat yang berulang kepada asnaf-asnaf tertentu saja.
6	06-07-2023	5	1. Membahas tentang produk Virtual Account dan Transfer Out dalam pandangan syariah 2. Mengkaji SOP Virtual Account dan Transfer Out.
7	15-09-2023	4	1. Ijarah multijasa Umrah, akad dan SOP ijarah Multijasa Umrah, pandangan syariah tentang produk ijarah multijasa umrah 2. Pembiayaan Sindikasi (al tamwil, al mashrifi, al mujamma) 3. Produk Pembiayaan Kepada P2P (Peer to Peer atau Fintech Lending) Syariah Dengan Skema Channeling 4. Sosialisasi materi Pra ijtima DSN MUI

Nama Lembaga Jasa : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah
 Posisi Laporan : 31 Desember 2023

8	26-09-2023	4	1. Ijarah multijasa Umrah, akad dan SOP ijarah Multijasa Umrah, pandangan syariah tentang produk ijarah multijasa umrah 2. Pembiayaan Sindikasi (al tamwil, al mashrifi, al mujamma) 3. Produk Pembiayaan Kepada P2P (Peer to Peer atau Fintech Lending) Syariah Dengan Skema Channeling 4. Sosialisasi materi Pra-ijtima DSN MUI
9	20-10-2023	4	Tentang permasalahan bolehkah membayar obyek murabahah secara bertahap/ droping bertahap terhadap pembayaran objek yang dibeli pada pembiayaan murabahah.
10	14-12-2023	4	Sosialisasi materi Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah 2023

Keterangan

BPRS baru memiliki satu anggota DPS sehingga belum ada rapat antar anggota DPS, walaupun demikian DPS mengikuti rapat pengurus yang dihadiri oleh : 1. Efral Susanto (anggota DPS) 2. Andi novianza wirajati (Komisaris) 3. Dharma Setiawan (Direktur Utama) 4. Deri Haspriyanti (Direksi) 5. Syapri (Ka. Pemasaran) 6. Reni Marlina (PE Kepatuhan) 7. Kholifatul Amri (AO) 8. Harry Muharamon (IT), kehadiran rapat sesuai dengan rincian tanggal diatas.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	10	0	100.00

Keterangan

Anggota DPS baru satu. Rapat antar anggota DPS belum ada, walaupun demikian DPS hadir pada saat ada rapat pengurus yang diikuti oleh DPS sebanyak 10 kali, kehadiran rapat dilakukan secara fisik bukan secara telekonferensi

Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Rutin

Nama Lembaga Jasa

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan

31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Pada tahun 2023 tidak ditemukan Fraud dari anggota Direksi, Dekom , pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Tidak ada permasalahan hukum (pidana/perdata) pada periode laporan tahun sebelumnya dan periode tahun laporan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan
kepentingan**

Keterangan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BPRS Muamalat Harkat

Rutin

Nama Lembaga Jasa : PT Bank Perekonomian Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	10-01-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 1	Karyawan Tetap (Yuyun Djamin)	200,000
2	17-01-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 2	Karyawan Tetap (Agung Fajri Heryanto)	50,000
3	21-02-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 3	Karyawan Tetap (Hendri Agusti)	150,000
4	16-03-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 4	Anak Karyawan (Ariyanti Puspa Ningsih)	200,000
5	30-03-2023	Kegiatan Sosial	Bantuan acara buka puasa bersama	Panitia Masjid Raya	2,500,000
6	03-05-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 5	Anak Karyawan (Rudiansyah)	200,000
7	24-05-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 6	Karyawan Tetap (Tafid Akbar)	200,000
8	16-06-2023	Kegiatan Sosial	Uang Duka (Nasabah Meninggal Dunia)	Nasabah Pembiayaan (Tati Syaherni)	150,000
9	27-06-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 7	Karyawan Tetap (Agung Fajri Heryanto)	200,000
10	08-08-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 8	Karyawan Tetap (Novi Dahliyah)	200,000
11	08-08-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 9	Karyawan Tetap (Reni Marlini)	200,000
12	25-10-2023	Kegiatan Sosial	Donasi ke Palestina	Warga palestina	2,000,024
13	25-10-2023	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 10	Istri Karyawan (Rovi R)	200,000

Keterangan

BPRS tidak ada kegiatan yang mengandung politik

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Periode Laporan : 31-12-2023
Alamat : Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma
Nomor Telepon : 0736-7311407
Modal Inti : 9,512,635,897.00
Total Aset : 80,836,585,304.00
Bobot Faktor : B
Status Audit Ekstern : Tidak Diaudit
Nilai Komposit : 2.2
Peringkat Komposit : 2
Analisis : BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Bobot Faktor B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.00	0.80	0.20	2.00	0.40	Kelamáhannya : Direksi masih perlu mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku agar kedepannya bank lebih baik lagi. Kelebihannya : Direksi sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai dan sudah berusaha menerapkan ketentuan yang ada sehingga bank dapat tumbuh dan sehat, ketentuan dari OJK sudah diupayakan penerapannya pada bank
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	1.00	0.85	0.20	2.05	0.31	Kelemahannya : Dekom masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya. Kelebihannya : Dekom telah memenuhi semua ketentuan dari OJK dan sudah memberikan masukan/opini untuk perbaikan bank kedepannya

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Bobot Faktor B

Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	1.20	0.86	0.26	2.32	0.23	Kelamahannya : Anggota DPS baru satu sehingga belum memenuhi ketentuan dari OJK, untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS belum maksimal. Kelebihannya : DPS telah memenuhi semua ketentuan dari OJK, dan selalu berusaha memberikan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Bank belum memiliki Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Bobot Faktor B

Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.50	0.80	0.25	2.55	0.19	Kelemahannya : Bank belum sepenuhnya melaksanakan prinsip syariah, terbukti masih ditemukannya hal-hal yang mesti diperbaiki dari laporan/Opini DPS. Kelebihannya : Bank berupaya memperbaiki kesalahan dan memenuhi ketentuan sesuai dengan prinsip syariah agar kedepannya bisa lebih baik lagi
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	1.00	0.80	0.20	2.00	0.15	kelemahannya : Bank belum menemukan adanya benturan kepentingan sehingga belum ada kesimpulan untuk kelemahan faktor ini. Kelebihannya : Apabila ada permasalahan bank selalu menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan bank.

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Bobot Faktor B

Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	1.00	0.87	0.27	2.14	0.16	Kelemahannya : FE kepatuhan masih perlu belajar dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku Kelebihannya : FE Kepatuhan berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang diikuti.
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	1.10	0.90	0.20	2.20	0.17	Kelemahannya : FE Audit Inter masih belum memahami ketentuan dan peraturan secara sempurna kelebihannya : FE Audit Intern berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan -pelatihan yang diikuti. \n

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Bobot Faktor B

Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.80	0.20	2.00	0.05	Kelemahannya : Fungsi Audit Ekstern belum berlangsung sempurna karena pada saat pemeriksaan masih memerlukan informasi tentang produk syariah Kelebihannya : Hasil penilaian dari KAP transparan dan sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	1.00	1.03	0.30	2.33	0.17	Kelemahannya : Penerapan manajemen risiko belum berlaku secara efektif karena masih baru diterapkan pada bank Kelebihannya : Dengan mulai diterapkannya manajemen risiko, bank bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan guna meminimalisir risiko yang ada

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Bobot Faktor B

Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	1.00	0.80	0.20	2.00	0.10	Kelemahannya : Belum ditemukan kelemahan pada BMPD. Kelebihannya : BPRS sudah memiliki SOP BMPD yang bisa dijadikan pedoman dalam kegiatan pemberian kredit dan belum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap ketentuan BMPD sesuai dengan peraturan berlaku
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	1.00	0.80	0.20	2.00	0.10	Kelemahannya : Masih ditemukan target - target yang belum tercapai sesuai dengan rencana bank, Kelebihannya : Dari RBB bank belajar melihat naik turunnya pertumbuhan bank dari tahun ketahun apakah sudah terealisasi atau belum rencana yang dibuat, merupakan pemicu agar bank terus berkembang dan lebih baik kedepannya.

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2023

Bobot Faktor B

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	1.50	0.90	0.20	2.60	0.13	Kelemahannya : Masih belum memiliki daya tarik yang kuat terhadap produk yang ditawarkan kepada para nasabah penabung maupun pembiayaan terbukti belum adanya kenaikan yang signifikan terhadap produk kami Kelebihannya : Bank selalu berusaha terbuka terhadap kondisi keuangan dan non keuangan dengan mempublikasikannya ke media elektronik (website) maupun non elektronik (brosur, spanduk, media masa dll)
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	



BANK MUAMALAT HARKAT
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Semester II Tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bengkulu, 31 Januari 2024

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)



Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620052
Nama BPRS : P T BPRS MUAMALAT HARKAT
Jenis BPRS : BPRS B (Modal inti < 50.000.000.000)
Tahun Laporan : Lap. Semester II Tahun 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.20	2
Analisis	
<p>BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.</p>	

Bengkulu, 31 Januari 2024

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)